



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RENCANA KERJA

TAHUN 2026



KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR
JALAN : WOLTER MONGONSIDI TENGGARONG
KODE POS 75511

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur Alhamdulillah Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026.

Rencana Kerja (RENJA) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami menyadari Rencana Kerja (RENJA) ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran masukan dari semua pihak yang berkepentingan dalam rangka perbaikan selanjutnya.

Diharapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara 2026 ini dapat dijadikan acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Idaman Terbaik“ ***Terwujudnya Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.*** “



Tenggarong, 06 Agustus 2025

Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kutai Kartanegara

ALFIAN NOOR, SE, M.Ling
NIP. 19690113 199303 1 005

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja perangkat daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
3. Renja perangkat daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam

rencana kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja perangkat daerah pada tahun 2026.

Mengingat arti strategis dokumen renja perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen renja perangkat daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

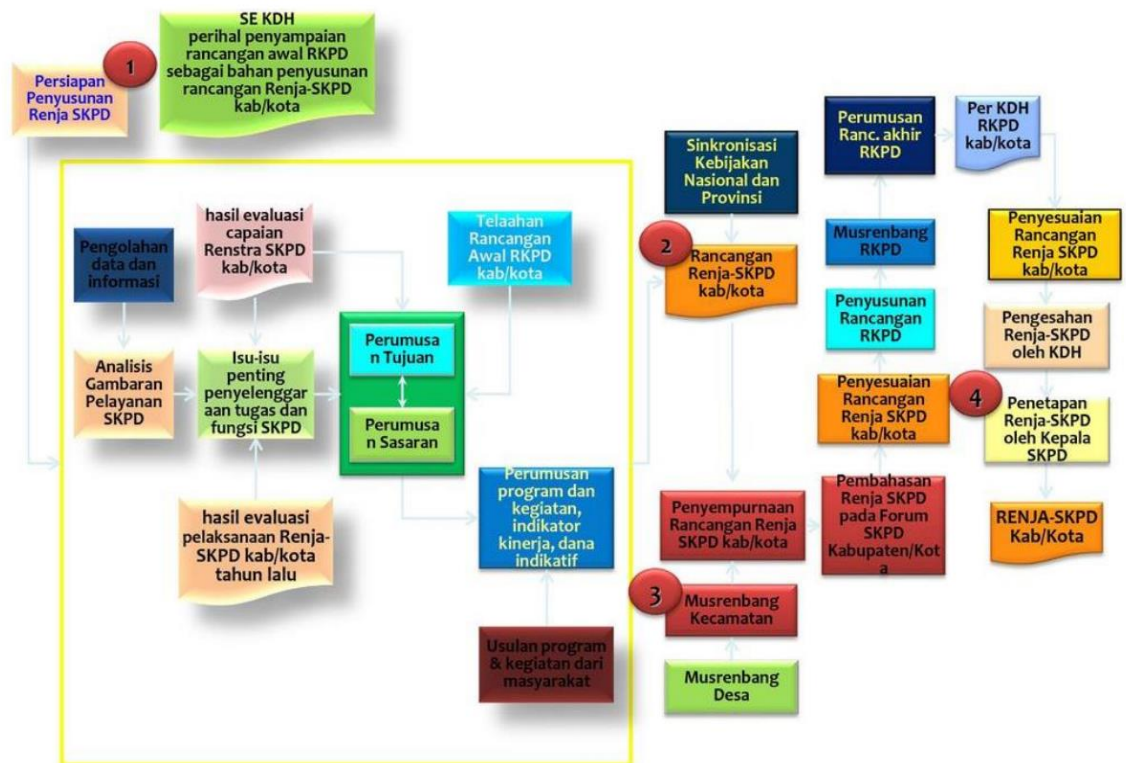
Rencana kerja Tahun 2026 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berkenaan. Dimana:

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil, indikator kinerja program (outcome), indikator kinerja kegiatan (output), indikator kinerja sub kegiatan (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah kabupaten / kota adalah sebagaimana tercantum dalam gambar 1.1

Gambar 1. 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten/Kota



Sumber data : Permendagri 86 tahun 2017

Kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun dokumen perencanaan diatur dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Dalam keempat peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh daerah. Renja perangkat daerah ini memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Program dan kegiatan yang tertuang dalam renja meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur. Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
18. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.
23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara tahun 2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan rancangan renja sebagai pedoman acuan perencanaan progam dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:

- a. Membantu pengambilan keputusan untuk memilih secara rasional diberbagai kemungkinan, sumber daya yang harus dialokasikan, sejalan dengan tujuan dan sasaran serta hasil yang diharapkan;

- b. Menyusun program dan kegiatan kedepan berdasarkan potensi serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tersedianya seluruh informasi dalam rencana kerja dan diharapkan dokumen rencana kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan rencana kerja Tahun 2026 ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan rancangan renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA –PD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD, serta Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan kebijakan terhadap kebijakan program nasional, tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Sebagai bagian dari proses ini, setiap perangkat daerah menyusun dan melaksanakan program serta kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian/Lembaga. Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa. Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dengan jumlah anggaran setelah dilakukan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) adalah sebesar Rp.23.352.398.850,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 19.414.613.701,00 atau 83,01% dengan rincian yang terlihat dalam Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegi atan/Sub/Kegi atan	Usulan Perubahan Renja 2024					Realisasi Keuangan	Realisa si Fisik	% Keuan gan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartan egara	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Triliun Rupiah	7,35	23.352.398.850,00	19.414.613.701,00	16,42	83,14	223
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,25			92,91		105,28
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta	Kab. Kutai Kartan egara	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	74	16.453.909.214,00	14.662.779.021,00	74,13	89,11	100,18
2	Program Pengembanga n Iklim Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartan egara	Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA	Proyek	640	1.150.000.000,00	1.148.040.385,00	3085	99,83	473,16
3	Program Promosi Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartan egara	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	Investo r	310	1.081.660.000,00	1.077.936.018,00	281	99,66	90,65
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartan egara	Jumlah Penerbitan Izin	izin	10.000	894.053.636,00	839.436.788,00	12.757	93,89	127,57
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartan egara	Kenaikan/Pen urunan Nilai Realisasi Invetasi	%	30,68	1.229.923.000,00	885.676.489,00	11,99	72,01	35,37
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartan egara	Jumlah Aplikasi	Aplikas i	3	2.542.853.000,00	800.745.000,00	3	31,49	100,00

Sumber data : Bagian Program dan Keuangan DPMPTSP Tahun 2025

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Kinerja input sebesar 89,11% dan Kinerja Output sebesar 100,18%, pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan, antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
Indikator kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja dengan Capaian Kinerja input sebesar 96,92% dan kinerja Output 100%, pada kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, antara lain:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator sub kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan PD.

Capaian kinerja: Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 97,37 % yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD.

Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 88,94 % yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 98,23% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.

Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja output yaitu :

1. Terbatasnya jumlah dan kapasitas aparatur yang memahami teknik perencanaan dan evaluasi menjadi kendala utama.

2. Masih adanya ketidak Akuratan data.

Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut perangkat daerah melakukan :

1. Dukungan dan arahan dari Kepala DPMPTSP mendorong pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang lebih baik.
2. Bimbingan dari instansi terkait seperti Bappeda, Inspektorat, dan BPKAD meningkatkan kualitas dokumen dan pelaksanaan evaluasi kinerja.
3. Fokus kegiatan pada hasil (outcome) yang berdampak langsung kepada masyarakat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang jelas dan terukur.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator kegiatan: Cakupan Administrasi Keuangan dengan capaian kinerja input sebesar 87% dan Kinerja Output sebesar 100% pada kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, antara lain:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator sub kegiatan: Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN.

Capaian kinerja: Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 86,53% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator sub kegiatan: Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN.

Capaian kinerja: Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,50% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.

c. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan.

Capaian kinerja: Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,91% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.

- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD.
Capaian kinerja: Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,16% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.
 - e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran.
Capaian kinerja: Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 95,83% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator kegiatan: Cakupan Administrasi BMD dengan capaian kinerja input sebesar 90,89% dan Kinerja Output sebesar 100% pada kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, antara lain:
- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah.
Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 74,51% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.
 - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator Sub Kegiatan : jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD.
Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 98,07% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator kegiatan: Cakupan Administrasi BMD dengan capaian kinerja input sebesar 98,10% dan Kinerja Output sebesar 100 % pada kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, antara lain:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 92,01% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.
 - b. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.
Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 95,76% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 98,89% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.
 - d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 100% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator kegiatan: Cakupan Administrasi Umum dengan capaian kinerja input sebesar 98,27% dan Kinerja Output sebesar 100% pada kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, antara lain:
- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.
Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 97,89% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%

- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.
Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,63% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan.
Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 100% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan.
Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 66,30% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,05% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.
 - f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 100% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator kegiatan: Cakupan Pengadaan BMD dengan capaian kinerja input sebesar 88,01% dan Kinerja Output sebesar 100 % pada kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, antara lain:

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.
Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 88,01% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator kegiatan: Cakupan Penyediaan Jasa dengan capaian kinerja input sebesar 100% dan Kinerja Output sebesar 100% pada kegiatan ini terdiri dari 4 (Empat) sub kegiatan, antara lain:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan. Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 98,09% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan. Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 90,07% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan. Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,41% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kegiatan Cakupan Pemeliharaan BMD. Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 68,84% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%. pada kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, antara lain:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya. Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 100% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara. Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 98,53% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator Sub Kegiatan Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya yang dipelihara /direhabilitasi. Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 23,08% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 50%.

II. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator program Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA. Capaian Kinerja input sebesar 99,83 % dan Kinerja Output sebesar 473,16%, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, antara lain :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
Indikator Kegiatan Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,61% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%. Dengan 1 (satu) sub Kegiatan:
 - a. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar. Capaian Kinerja: Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,61% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan Jumlah Kajian Peta Potensi Investasi, Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,88% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%. Dengan 2 (satu) sub Kegiatan :

a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub kegiatan Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja: Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,76% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.

b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Indikator Sub kegiatan Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota. Capaian Kinerja: Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,93% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.

III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator program Jumlah Investor (PMA/PMDN). Capaian Kinerja input sebesar 99,66% dan Kinerja Output sebesar 90,65%, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, antara lain :

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan Jumlah Investor (PMA/PMDN), Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,66% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%. Dengan 2 (dua) sub Kegiatan :

a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota. Capaian Kinerja: Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 98,77% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.

- b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja: Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,73% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.

IV. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator program Jumlah Penerbitan Izin. Capaian Kinerja input sebesar 93,89% dan Kinerja Output sebesar 127,57%, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, antara lain :

- 1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan Indek Kepuasan Masyarakat, Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 93,89% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 106,05%. Dengan 4 (empat) sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah. Capaian Kinerja: Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 100% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.

- b. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik. Capaian Kinerja: Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 99,49% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.

- c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan. Capaian Kinerja: Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 82,27% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.
- d. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal. Capaian Kinerja: Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 100% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.

V. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator program Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi. Capaian Kinerja input sebesar 72,01% dan Kinerja Output sebesar 35,37% pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, antara lain :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan Jumlah Pengendalian PMA/PMDN, Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 90,88% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 72,01%. Dengan 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya.
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya. Capaian Kinerja: Kinerja Input, telah tercapai

kinerja input sebesar 57,62% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 2%.

b. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Capaian Kinerja: Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 83,20%, yaitu dari target dan kinerja output sebesar 598,67%

c. Pengawasan Penanaman Modal

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha. Capaian Kinerja: Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 17,33% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 66,64%.

VI. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator program Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi. Capaian Kinerja input sebesar 31,49% dan Kinerja Output sebesar 100%, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, antara lain :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan Pengembangan dan Maintenance Aplikasi, Capaian Kinerja : Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 31,49% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%. Dengan 1 (satu) sub Kegiatan :

a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan, Capaian Kinerja: Kinerja Input, telah tercapai kinerja input sebesar 31,49% yaitu dari target dan kinerja output sebesar 100%.

Adapun hasil capaian kinerja perangkat daerah yang telah kami hitung Berdasarkan Realisasi fisik dan keuangan, dapat dilihat dari tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2 HASIL CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub/Kegiatan	Usulan Perubahan Renja 2024					REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK	% Keuangan	% Fisik
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai realisasi investasi PMDN/PMA	7,35	triliun Rupiah	23.352.398.850,00	19.414.613.701,00	16,42	83,14	223,40
			Indeks Kepuasan Masyarakat	88,25	Nilai			92,91		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	74	Nilai	16.453.909.214,00	14.662.779.021,00	78,50	89,11	100,18
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja	16	Dokumen	786.959.126,00	762.735.913,00	16	96,92	100,00

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	4	Dokumen	275.961.000,00	268.693.832,00	4	97,37	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	85.000.000,00	75.601.900,00	4	88,94	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9	Laporan	425.998.126,00	418.440.181,00	9	98,23	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Administrasi Keuangan	100	%	10.718.011.530,00	9.324.570.313,00	83,13	87,00	83,13
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN	66	Orang/Bulan	10.312.681.530,00	8.923.235.209,00	66	86,53	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1	Laporan	65.000.000,00	64.677.799,00	1	99,50	100,00
6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Dokumen	24.330.000,00	24.306.900,00	5	99,91	100,00
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD	24	Laporan	286.000.000,00	283.600.000,00	24	99,16	100,00
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	30.000.000,00	28.750.405,00	1	95,83	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Administrasi BMD	100	%	100.664.000,00	91.496.725,00	100	90,89	100,00

9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	1	Dokumen	30.664.000,00	22.846.972,00	1	74,51	100,00
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4	laporan	70.000.000,00	68.649.753,00	4	98,07	100,00
4	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Cakupan Admintrasi Kepegawaian</i>	<i>100</i>	<i>%</i>	<i>802.000.000,00</i>	<i>786.777.803,00</i>	<i>100</i>	<i>98,10</i>	<i>100,00</i>
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2	Paket	127.000.000,00	116.852.000,00	2	92,01	100,00
12	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	Dokumen	100.000.000,00	95.761.802,00	100	95,76	100,00
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15	Orang	75.000.000,00	74.164.001,00	15	98,89	100,00
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150	Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	150	100,00	100,00
5	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Cakupan Admintrasi Umum</i>	<i>100</i>	<i>%</i>	<i>1.150.238.545,00</i>	<i>1.130.291.765,00</i>	<i>100</i>	<i>98,27</i>	<i>100,00</i>
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	170.000.000,00	166.407.400,00	1	97,89	100,00
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	Paket	250.000.000,00	249.076.000,00	1	99,63	100,00
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Paket	88.303.400,00	88.303.400,00	2	100,00	100,00
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	Paket	30.000.000,00	19.890.000,00	12	66,30	100,00
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	561.935.145,00	556.614.965,00	12	99,05	100,00

20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	500	100,00	100,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Pengadaan BMD	100	%	387.226.000,00	340.806.000,00	100	88,01	100,00
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	70	Unit	387.226.000,00	340.806.000,00	70	88,01	100,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Penyediaan Jasa	100	%	1.851.013.649,00	1.773.270.751,00	100	95,80	100,00
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Laporan	5.599.000,00	5.492.000,00	3	98,09	100,00
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	128.144.389,00	116.225.810,00	12	90,70	100,00
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Laporan	1.567.790.260,00	1.502.956.941,00	24	95,86	100,00
25	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	149.480.000,00	148.596.000,00	12	99,41	100,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Cakupan Pemeliharaan BMD	100	%	657.796.364,00	452.829.751,00	100	68,84	100,00
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	48	Unit	316.930.000,00	316.930.000,00	48	100,00	100,00
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60	Unit	75.866.364,00	74.747.800,00	60	98,53	100,00
28	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	2	Unit	265.000.000,00	61.151.951,00	1	23,08	50,00

2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA	652	Proyek	1.150.000.000,00	1.148.040.385,00	3085	99,83	473,16
9	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perda	200.000.000,00	199.223.310,00	1	99,61	100,00
29	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar	30	Dokumen	200.000.000,00	199.223.310,00	30	99,61	100,00
10	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kajian Peta Potensi Investasi	3	Dokumen	950.000.000,00	948.817.075,00	3	99,88	100,00
30	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	300.000.000,00	299.279.786,00	1	99,76	100,00
31	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	1	Dokumen	650.000.000,00	649.537.289,00	1	99,93	100,00
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	310	Investor	1.081.660.000,00	1.077.936.018,00	281	99,66	90,65
11	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	310	Investor	1.081.660.000,00	1.077.936.018,00	281	99,66	90,65
32	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	2	Dokumen	81.660.000,00	80.659.600,00	2	98,77	100,00
33	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	Dokumen	1.000.000.000,00	997.276.418,00	4	99,73	80,00
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penerbitan Izin	10.000	Izin	894.053.636,00	839.436.788,00	12757	93,89	127,57
12	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang	Kab. Kutai Kartanegara	Indek Kepuasan Masyarakat	87,75	Nilai	894.053.636,00	839.436.788,00	92,91	93,89	105,88

	menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12	Kegiatan Usaha	40.000.000,00	40.000.000,00	12	100,00	100,00
35	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	500	Pelaku Usaha	275.000.000,00	273.587.450,00	500	99,49	100,00
36	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan	100	Pelaku Usaha	300.000.000,00	246.795.702,00	100	82,27	100,00
37	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	300	Pelaku Usaha	279.053.636,00	279.053.636,00	300	100,00	100,00
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab. Kutai Kartanegara	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi	30,68	%	1.229.923.000,00	885.676.489,00	10,85	72,01	35,37
13	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengendalian PMA/PMDN	1020	Pelaku Usaha	1.229.923.000,00	885.676.489,00	927	72,01	90,88
38	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	150	Kegiatan Usaha	251.437.000,00	144.871.674,00	3	57,62	2,00

39	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	150	Pelaku Usaha	535.734.000,00	445.753.895,00	898	83,20	598,67
40	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	150	Kegiatan Usaha	442.752.000,00	295.050.920,00	26	66,64	17,33
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aplikasi	3	Aplikasi	2.542.853.000,00	800.745.000,00	3	31,49	100,00
14	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Pengembangan dan Maintance Aplikasi</i>	3	Aplikasi	2.542.853.000,00	800.745.000,00	3	31,49	100,00
41	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	3	Dokumen	2.542.853.000,00	800.745.000,00	3	31,49	100,00

Sumber Data : Program dan Keuangan DPMPSTP 2024

Berdasarkan reuiu hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam renja dan renstra disajikan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (Tabel T-C . 29) menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kutai Kartanegara dan pencapaiannya yaitu pada Tabel 2.3 dibawah ini :

2	18	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	12	Dokumen	4	Dokumen	5	5	100	5	12	100
2	18	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	4	4	100	4	6	600
2	18	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	0	0	0	0	2	200
2	18	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	0	0	0	0	2	200
2	18	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	0	0	0	0	2	200

2	18	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan lapaoran hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	Laporan	9	Laporan	9	9	100	1	24	400
2	18	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Laporan	0	Laporan	0	0	0	1	0	0
2	18	1	02.01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	1	0	0
2	18	1	02.01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup PD	0	Data	0	Data	0	0	0	1	0	0

2	18	1	02.01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu Dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Berita Acara	0	Berita Acara	0	0	0	1	0	0
2	18	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100	Persentase	100	Persentase	100	100	100	100	100	100,00
2	18	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN	98	Orang/Bulan	150	Orang/Bulan	66	66	100	66	282	287,76
2	18	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1	Laporan	2	Laporan	1	1	100	4	7	700,00
2	18	1	02.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Dokumen	2	Dokumen	1	1	100	4	7	140,00

2	18	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD	3	Laporan	48	Laporan	24	24	100	3	75	2500,00
2	18	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	2	Dokumen	1	1	100	4	7	700,00
2	18	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi BMD	15	Dokumen	10	Dokumen	5	5	100	16	49	326,67
2	18	1	02.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1	Dokumen	5	Dokumen	2	2	100	7	14	1400
2	18	1	02.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	0	laporan	0	laporan	0	0	0	0	0	0

2	18	1	02.03	04	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2	Dokumen	8	Dokumen	4	4	100	12	24	1200
2	18	1	02.03	05	Penata Usaha Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	0	Laporan	0	Laporan	0	0	0	0	0	0
2	18	1	02.03	06	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan barang Milik SKPD	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	0	0	0
2	18	1	02.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	Presentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	0	Persentase	0	Persentase	0	0	0	100	100	0
2	18	1	02.04	01	Rencana Pengelolaan retribusi Daerah	Jumlah dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retrebusi daerah	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	1	1	0
2	18	1	02.04	02	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retribusi daerah	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	1	1	0
2	18	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Admintrasi Kepegawaian	100	Persentase	100	Persentase	100	100	100	100	100	100

2	18	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	300	paket	133	paket	127	127	100	260	520	173,33
2	18	1	02.05	5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	200	Dokumen	4	4	100	204	408	40800
2	18	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15	Orang	30	Orang	15	15	100	45	90	600,00
2	18	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	75	Orang	172	Orang	150	150	100	322	644	859
2	18	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Adminstrasi Umum	100	Persentase	100	Persentase	100	100	100	100	100	100
2	18	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	35	paket	140	paket	1	70	7000	1	211	602,86
2	18	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25	paket	80	paket	1	40	4000,00	1	121	484,00

2	18	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	22	paket	44	paket	2	22	1100,00	2	68	309,09
2	18	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	500	Dokumen	2	Dokumen	12	1	8,33	12	15	3,00
2	18	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200	Laporan	800	Laporan	12	400	3333,33	12	1.212	606,00
2	18	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	500	Dokumen	1000	Dokumen	500	500	100,00	500	2.000	400,00
2	18	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan BMD	100	Persentase	100	Persentase	100	100	100	100	100	100
2	18	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10	Unit	92	Unit	70	70	100	152	314	3140
2	18	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa	100	Persentase	100	Persentase	100	100	100	100	100	100

2	18	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500	Laporan	4	Laporan	3	3	100,00	2	9	0,36
2	18	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	24	Laporan	12	12	100	12	48	400
2	18	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50	Laporan	6	Laporan	24	24	100	24	54	108
2	18	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49	Laporan	24	Laporan	12	12	100	12	48	97,96
2	18	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD	108	Persentase	100	Persentase	100	100	100	100	100	100

2	18	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	48	unit	48	unit	48	48	100	48	48	100
2	18	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60	unit	60	unit	60	60	100	60	60	100
2	18	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan gedung lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	0	Unit	0	Unit	2	1	50	1	1	0
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek (PMA/PMDN)	3267	Proyek	640	Proyek	640	1703	266,09	652	2.995	91,67
2	18	2	02.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Invrstasi	1	Dokumen	3	Dokumen	3	3	100	1	7	700
2	18	2	02.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	1	Dokumen	3	Dokumen	3	3	100	1	7	700

2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	350	Investor	260	Investor	260	284	109,23	310	854	244
2	18	3	02.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Industri/Hilirisasi	1460	Investor	260	Investor	260	284	109,23	310	854	58,49
2	18	2	02.02	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	1	Dokumen	2	Dokumen	2	2	100	1	5	500
2	18	2	02.02	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4	Dokumen	5	Dokumen	5	4	80	4	13	325
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penerbitan Izin	4750	Izin	1000	Izin	850	12.796	1279,6	950	14.746	310,44
2	18	4	02.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indek Kepuasan Masyarakat	92	Nilai	88	Nilai	87,75	92,91	101,53	88,25	266	288,7

2	18	4	02.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	500	Pelaku Usaha	2000	Pelaku Usaha	2000	2000	100	500	4.500	900
2	18	4	02.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	500	Kegiatan Usaha	300	Kegiatan Usaha	300	300	100	500	1.100	220
2	18	4	02.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan	500	Orang	100	Orang	100	100	100	100	300	60

2	18	4	02.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	500 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	12	12	100	12	36	7,2
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi	2 Persentase	30,5 Persentase	30,47	51,38	168,62	30,68%	61,25	3062,34
2	18	5	02.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian PMA/PMDN	2240 Pelaku Usaha/Kegiatan	550 Pelaku Usaha/Kegiatan	550	550	100	1020	2.120	94,64
2	18	5	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	550 Kegiatan usaha	100 Kegiatan usaha	100	100	100	100	300	54,55
2	18	5	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	500 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	300	300	100	100	700	140

2	18	5	02.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan	250	Kegiatan usaha	100	Kegiatan usaha	100	100	100	100	300	120
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi	3	Aplikasi	3	Aplikasi	3	4	133,33	3	10	333,33
2	18	6	02.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Maintance Aplikasi	15	Aplikasi	3	Aplikasi	3	4	133,33	3	10	66,67
2	18	6	02.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	80	Dokumen	4436	Dokumen	4436	4436	100	3	8.875	11093,75

Sumber data : Program dan Keuangan DPMPTSP 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Penanaman Modal.

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu, serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi DPMPTSP; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung pada DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini ditunjukkan melalui Misi 2 (Dua) diatas yaitu “Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif”. Misi 3 (Tiga) “Memperkuat Pembangunan Ekonomi berbasis Pertanian, Pariwisata dan ekonomi Kreatif” selain itu, DPMPTSP merupakan salah satu PD pengampu program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja program dan didukung dengan data-data yang

relevan untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target Indikator Kinerja Utamanya (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis instansi. Dalam sasaran pertama Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal tahun 2024 nilai capaian kinerjanya sebesar 101,53 % dengan kategori Sangat Baik, hal tersebut dihitung berdasarkan formulasi perhitungannya yaitu perbandingan jumlah realisasi capaian sebesar 92,91 dibandingkan dengan target kinerja sebesar 87,75. Untuk mewujudkan hal tersebut, beberapa langkah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satunya adalah menarik minat para pelaku usaha utamanya UMKM untuk mendapatkan legalitas usahanya melalui kegiatan Pilot untuk UMKM pada 20 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam sasaran kedua Meningkatnya Nilai Investasi Daerah tahun 2024 nilai capaian kinerjanya sebesar 223%. Capaian Nilai Investasi Daerah tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp. 16.415.888.215.433 dari target nilai investasi daerah sebesar Rp. 7.355.178.519.952 dengan persentase sebesar 223%. Nilai realisasi investasi daerah pada tahun 2024 sebesar Rp. 16.415.888.215.433 diperoleh dari nilai investasi yang dirilis oleh BKPM RI dengan rincian nilai realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) sebesar Rp. 8.069.017.988.494 dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sebesar Rp. 8.346.870.226.939 Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan memiliki capaian kinerja sebesar 101,55%. Ini diambil dari nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Permendagri 88 Tahun 2023. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan dapat dilihat dari Tabel TC 30 dibawah ini

Tabel TC-30

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah/target Penanaman Modal PMDN/PMA (Triliyun Rupiah)			7	7,2	7,35	7,4	7,45	16,42	16,74	17,08	

2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			87,12	87,75	88,25	89,52	91,73	92,91	94,78	96,68	
---	----------------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Sumber Data : Program dan Keuangan DPMPTSP 2024

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran strategis dalam mengelola investasi serta menyelenggarakan layanan perizinan di daerah. Dengan meningkatnya dinamika pembangunan dan tuntutan investasi yang semakin kompetitif, berbagai tantangan muncul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat guna meningkatkan efektivitas layanan, mendorong pertumbuhan investasi, serta memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Adapun untuk tahun 2026 ini pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengangkat isu-isu strategis yaitu :

1. Implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh;
2. Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Pengembangan perekonomian berkelanjutan;
4. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN);
5. Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah;
6. Transformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan
7. Penataan Ruang dan Sumber Daya Air (Air Baku dan Irigasi)

Dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki peran dan fungsi yaitu:

1. Penataan Regulasi dan Reformasi Perizinan
 1. Harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam perizinan investasi.
 2. Penyederhanaan prosedur perizinan melalui sistem OSS.
 3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan.
2. Meningkatkan Daya Tarik Investasi Daerah
 1. Penyediaan fasilitas investasi yang kompetitif.
 2. Insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor.

3. Promosi investasi berbasis sektor unggulan daerah.
3. Pemerataan Infrastruktur Penunjang Investasi
 1. Pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air.
 2. Peningkatan konektivitas antar wilayah untuk distribusi barang dan jasa.
 3. Fasilitas pendukung industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK).
4. Pemanfaatan Teknologi dalam Layanan Perizinan
 1. Digitalisasi layanan perizinan dengan sistem yang lebih terintegrasi.
 2. Penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memastikan kepatuhan regulasi.
 3. Implementasi sistem pelayanan terpadu berbasis online yang ramah pengguna.
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 1. Pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai DPMPTSP.
 2. Penguatan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan prima.
 3. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perizinan dan investasi.
6. Sinergi dengan OPD dan Stakeholder
 1. Kolaborasi dengan perangkat daerah lain dalam penyelenggaraan layanan.
 2. Meningkatkan koordinasi dengan dunia usaha dan komunitas bisnis.
 3. Pendekatan multi-sektoral untuk mendorong investasi berkelanjutan.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2026 ini yaitu :

1. Penyederhanaan Regulasi dan Prosedur Perizinan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Mengintegrasikan sistem OSS dengan regulasi daerah.
 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan berbasis digital.
 3. Memastikan kepatuhan terhadap standar perizinan nasional dan daerah.

2. Optimalisasi Infrastruktur dan Fasilitas Investasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Pembangunan kawasan industri dan pusat ekonomi baru.
 2. Peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung investasi.
 3. Pengembangan kebijakan berbasis kebutuhan investor dan potensi daerah.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Digitalisasi layanan melalui pengembangan aplikasi dan platform online.
 2. Implementasi sistem antrian online untuk efisiensi pelayanan.
 3. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan melalui mekanisme feedback.
4. Strategi Promosi dan Peningkatan Investasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Menyelenggarakan forum investasi dan *business matching*.
 2. Mengembangkan paket insentif yang menarik bagi investor.
 3. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM.
5. Penguatan SDM dan Kelembagaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan berkelanjutan.
 2. Mendorong inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik.
 3. Penerapan budaya kerja berbasis kinerja dan pelayanan prima.
6. Kolaborasi dan Sinkronisasi Kebijakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.
 2. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam fasilitasi investasi.
 3. Membangun sistem evaluasi dan monitoring yang berbasis data.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada Rancangan awal RKPD dan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Dokumen RKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2026 sebagai acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail pada dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Mengacu pada rancangan awal rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 terdiri dari 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 55 (lima puluh lima) sub kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut disusun dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung pada DPMPSTP Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni Misi 1 (Satu) diatas yaitu “Memantapkan Birokrasi yang bersih, Efektif, efisien dan Melayani”. dan Misi 3 (Tiga) “Memperkuat Pembangunan Ekonomi berbasis Pertanian, Pariwisata dan ekonomi Kreatif”. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 berdasarkan hasil analisis kebutuhan terdiri dari 6 (enam) program, antara lain:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang akan dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.
2. Program Promosi Penanaman Modal yang akan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal yang akan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang akan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang akan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran strategis dalam mengelola investasi dan pelayanan perizinan di daerah. Dalam menjalankan tugasnya, DPMPTSP umumnya berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat, LSM, asosiasi pengusaha, akademisi, Perangkat Daerah (PD) Kabupaten/Kota. Namun, ada beberapa kondisi di mana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas ini tidak didasarkan pada usulan langsung dari para pemangku kepentingan.

Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti adanya regulasi yang mengharuskan program tertentu dijalankan, kebutuhan administrasi pemerintahan dan inisiatif internal dari DPMPTSP sendiri berdasarkan evaluasi dan analisis kebijakan sebelumnya.

Adapun beberapa sebab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak ada mencantumkan usulan masyarakat yaitu:

a. Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat

Beberapa program/kegiatan yang dijalankan oleh DPMPTSP bersifat wajib dan telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak membutuhkan masukan dari pemangku kepentingan daerah. Contohnya adalah implementasi sistem perizinan berbasis online melalui *Online Single Submission* (OSS) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

b. Evaluasi dan Analisis Internal DPMPTSP

Dinas sering kali melakukan evaluasi terhadap program-program sebelumnya serta menyusun kebijakan yang dianggap strategis tanpa harus menunggu usulan dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, program peningkatan kapasitas SDM di bidang pelayanan perizinan yang merupakan kebutuhan internal dinas.

c. Kurangnya Partisipasi dari Pemangku Kepentingan

Beberapa kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, atau akademisi mungkin kurang aktif dalam memberikan usulan atau tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk menyampaikan aspirasi mereka. Hal ini dapat menyebabkan program/kegiatan lebih banyak ditentukan secara internal oleh DPMPTSP.

d. Agenda Strategis Pemerintah Daerah

Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah memiliki agenda pembangunan tertentu yang harus dijalankan tanpa menunggu usulan dari pemangku kepentingan. Contohnya adalah program percepatan investasi yang diarahkan langsung oleh kepala daerah untuk menarik investor ke sektor-sektor prioritas.

Berikut adalah beberapa contoh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak berasal dari usulan pemangku kepentingan:

a. Implementasi Sistem Perizinan Berbasis Elektronik (OSS)

OSS merupakan sistem perizinan terintegrasi yang wajib diterapkan di seluruh Indonesia sesuai kebijakan dari pemerintah pusat. Program ini tidak bergantung pada usulan pemangku kepentingan daerah karena telah menjadi regulasi nasional.

b. Penyederhanaan Proses Perizinan dan Non-Perizinan

Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyederhanakan proses perizinan guna meningkatkan daya saing investasi. Program penyederhanaan ini dilaksanakan secara top-down tanpa melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan daerah.

c. Monitoring dan Evaluasi Investasi

DPMPTSP memiliki kewajiban untuk memantau dan mengevaluasi investasi yang telah masuk ke daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dinas serta dilakukan secara rutin tanpa perlu menunggu masukan dari pihak luar.

d. Peningkatan Kapasitas Pegawai di Bidang Perizinan

Pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai merupakan kebutuhan internal dinas yang dilaksanakan berdasarkan evaluasi kinerja tanpa perlu ada usulan dari pemangku kepentingan.

e. Penyesuaian Kebijakan dengan Regulasi Baru

Ketika ada perubahan regulasi, DPMPTSP harus menyesuaikan kebijakan dan prosedur kerja mereka. Misalnya, ketika ada perubahan dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri terkait investasi dan perizinan, DPMPTSP harus menyesuaikan sistem dan prosedurnya tanpa menunggu usulan dari pihak luar.

f. Digitalisasi Layanan Perizinan

Transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan inisiatif strategis yang sering kali ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pusat. DPMPTSP dapat

mengembangkan aplikasi atau sistem layanan online tanpa perlu usulan dari pemangku kepentingan.

g. Promosi Investasi Daerah

Dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi di Kutai Kartanegara, DPMPTSP dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan promosi, seperti pameran investasi, roadshow ke investor, atau penyusunan profil investasi daerah tanpa harus menunggu masukan dari pemangku kepentingan.

Adapun usulan rencana kerja awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2026 dapat dilihat pada TC 31 dibawah ini:

TABEL T - C. 31
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal		Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	10,85 Persen	20.433.370.644,00	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal		Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	11,07 Persen	23.534.440.481,00	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	74,13 Nilai	15.583.370.644,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	77,94 Nilai	16.934.440.481,00	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	13 Dokumen	285.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	753.671.500,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 Dokumen	65.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 Dokumen	150.000.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	85.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		-	

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	135.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	50.000.000,00	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	60.343.200,00	
5	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	umlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	umlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	
6	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	umlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	umlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	100.000.000,00	
7	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita acara	50.000.000,00	
8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun			Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	3 Dokumen	293.328.300,00	
2	Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administasi Keuangan	100 Persen	11.494.932.823,00	Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84,96 Persen	11.850.949.029,00	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan	66 orang/bulan	11.094.932.823,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan	104 Orang/bulan	11.381.533.629,00	

10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43 Dokumen	33.750.000,00	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	33.750.000,00	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 Laporan	65.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 laporan	50.000.000,00	
13	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	20.000.000,00	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	18.703.800,00	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD	3 Laporan	285.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD	2 Laporan	299.461.600,00	
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	30.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	33.750.000,00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administasi Barang Milik Daerah	100 Persen	54.999.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dearah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi Barang pada Perangkat Daerah	100 Persen	164.999.000,00	
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	1 Dokumen	14.999.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	1 Dokumen	14.999.000,00	

17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	1 laporan	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	1 laporan	50.000.000,00	
18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 laporan	40.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 laporan	40.000.000,00	
19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	50.000.000,00	
20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	-	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	20.000.000,00	
21	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			
22	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	20.000.000,00	
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi Kepegawaian	100 Persen	350.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian	100 Persen	175.000.000,00	
23	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket	-	

24	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	25.000.000,00	
25	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	100.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	100.000.000,00	
26	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	75 Orang	250.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	8 Orang	50.000.000,00	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi umum	100 Persen	1.284.435.145,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.175.000.000,00	
27	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	155.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	300.000.000,00	
28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	20.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	300.000.000,00	
29	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	2 paket	100.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	2 paket	250.000.000,00	
30	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bagan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	45.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bagan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	25.000.000,00	
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	691.935.145,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00	

32	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	500 Dokumen	200.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	500 Dokumen	50.000.000,00	
33	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah kegiatan/berita	12 Dokumen	72.500.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah kegiatan/berita			
7	Penataan Organisasi	Kutai Kartanegara	Persentase Jumlah Laporan hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan tatalaksana	100 Persen	-	Penataan Organisasi	Kutai Kartanegara	Persentase Jumlah Laporan hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan tatalaksana		-	
34	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	-	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	361.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
35	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20 Unit	361.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	100 Persen	1.430.153.676,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 Persen	1.639.110.952,00	
36	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.995.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.550.000,00	
37	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	185.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	266.766.216,00	

38	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.089.678.676,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.333.373.536,00	
39	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	149.480.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.421.200,00	
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	322.850.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1.155.710.000,00	
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	144 Unit	263.620.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	23 Unit	565.710.000,00	
41	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	60 Unit	59.230.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	120 Unit	90.000.000,00	
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya yang dipelihara /direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	2 Unit	500.000.000	
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA	665 Proyek	1.200.000.000,00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Realisasi total terhadap target investasi	17,16 Triliun Rupiah	2.500.000.000,00	
11	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000.000,00	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Draf regulasi (Perbup/Perda) yang mendukung sektor non-ekstraktif)	1 Dokumen	450.000.000,00	

43	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	30 Dokumen	350.000.000,00	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	70 Dokumen	450.000.000,00	
12	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Investasi	3 Dokumen	850.000.000,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kajian Peta Peluang Investasi Non ekstratif yang terukur (Dokumen IPRO)	3 Dokumen	2.050.000.000,00	
44	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000.000,00	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	250.000.000,00	
45	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000,00	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.800.000.000,00	
3	Program Promosi Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	340 Investor	950.000.000,00	Program Promosi Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	78 persen	1.050.000.000,00	
13	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	340 Investor	950.000.000,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan promosi investasi sektor non-ekstraktif yang diselenggarakan	4 kegiatan	1.050.000.000,00	
46	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000,00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000,00	
47	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	750.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	750.000.000,00	

4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penerbitan Izin	10.000 Izin	1.100.000.000,00	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100 Persen	1.300.000.000,00	
14	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,96 Nilai	1.100.000.000,00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penerbitan perizinan berusaha yang diterbitkan sesuai SP dan SOP berdasarkan peraturan perundang-undangan	2458 izin	1.300.000.000,00	
48	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	300.000.000,00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	400.000.000,00	
49	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	300.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	300.000.000,00	

50	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	300 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	1000 kegiatan usaha	500.000.000,00	
51	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12 Kegiatan Usaha	300.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12 Dokumen	100.000.000,00	
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Penaikan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)	30.90 Persen	900.000.000,00	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	100 Persen	750.000.000,00	
15	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengendalian PMA / PMDN	300 Pelaku usaha/kegiatan usaha	900.000.000,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha, dilakukan Bimbingan teknis dan di lakukan Pengawasan	150 pelaku usaha/kegiatan usaha	750.000.000,00	
52	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	100 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya			

53	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	100 Pelaku Usaha	250.000.000,00	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	400 Pelaku usaha	450.000.000,00	
54	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	24 Kegiatan Usaha	450.000.000,00	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	150 Kegiatan Usaha	300.000.000,00	
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aplikasi	3 Aplikasi	700.000.000,00	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100 persen	1.000.000.000,00	
16	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aplikasi	3 Aplikasi	700.000.000,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah data dan informasi perizinan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Laporan	1.000.000.000,00	
55	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	700.000.000,00	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	10 Dokumen	1.000.000.000,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Jangka Panjang Nasional di Bidang Investasi Tahun 2025-2045 Menuju Indonesia Emas 2045 yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” dimana Negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradapan bahari sebagai poros maritim dunia. Dimana berdaulat itu sendiri terdiri dari Ketahanan, Kesatuan, Mandiri dan aman bagi para investor. Maju dimana berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil bagi semua pihak baik itu masyarakat maupun investor. Berkelanjutan dimana Investasi yang ditawarkan merupakan investasi yang lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. 5 (Lima) sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yaitu:

- a. pendapatan per kapita setara negara maju;
- b. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
- c. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
- d. daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
- e. intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.

Dan untuk mendukung lima misi tersebut terdapat 8 (Delapan) misi (Agenda) Pembangunan 2045 yaitu:

- a. transformasi sosial;
- b. transformasi ekonomi;
- c. transformasi tata kelola;
- d. supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia;
- e. ketahanan sosial budaya dan ekologi;
- f. pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
- g. sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
- h. kesinambungan pembangunan.

Untuk mewujudkan visi Indonesia emas Tahun 2045 kementerian Investasi/BKPM membuat arah kebijakan Investasi yaitu:

1. Investasi yang diprioritaskan untuk mengembangkan industri prioritas, mendukung transformasi digital, modernisasi dan digitalisasi pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, industri kreatif dan pariwisata;
2. Investasi berorientasi ekspor yang dapat mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dan meningkatkan partisipasi dalam rantai produksi global;
3. Investasi hijau untuk mempercepat penerapan ekonomi hijau terutama percepatan transisi, energi, implementasi ekonomi sirkular, pengembangan transformasi hijau dan adopsi teknologi hijau;
4. Investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logika untuk mendorong integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global;
5. Investasi yang berorientasi riset dan inovasi;
6. Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Investasi Pusat-daerah dengan kebijakan ketenagakerjaan, energi, perdagangan, tata ruang, fiskal dan pembiayaan;
7. Iklim Investasi dan kepastian berusaha yang mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing;
8. Efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi agar lebih tepat sasaran dan transparan, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor dan wilayah;
9. Fasilitas Investasi Indonesia di luar negeri dengan pemanfaatan jaringan diaspora Indonesia.

Untuk mendukung arah kebijakan Nasional tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melakukan :

1. Mendorong Investasi yang mengembangkan industri prioritas, mendukung transformasi digital, modernisasi dan digitalisasi pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, industri kreatif dan pariwisata;

2. Membuat Peta potensi berstandar IPRO untuk green Investasi dan Blue Investasi;
3. Meningkatkan Iklim Investasi dan kepastian berusaha yang mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing;
4. Mendorong Percepatan PERDA Pemberian insentif dan kemudahan Berusaha di Kabupaten Kutai kartanegara;
5. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dengan menciptakan inovasi-inovasi baru sehingga mempermudah pelaku usaha dan stakeholder dalam pengurusan perizinan;
6. Meningkatkan SDM Aparatur pada DPMPTSP dan MPP;
7. Menjalin koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan selaras terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Koordinasi dan komunikasi antar instansi ini melibatkan Dinas / Instansi Teknis dan pihak-pihak terkait lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA PD

Dalam mendukung visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara (2025 – 2030), tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara tahun 2026 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu misi 1 dan 3:

- Misi 2 “Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif”
- Misi 3 “Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara“

Keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah pada RENJA 2026 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara berdasarakan Tujuan dan Sasaran urusan Penanaman Modal Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan misi 2 dan 3 Bupati Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

**Tujuan dan Sasaran
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara
Tahun 2026**

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan penanaman modal di Kutai Kartanegara	Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah	Pertumbuhan realisasi investasi sektor non ekstraktif
			Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha	Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Oleh karena itu dalam pendanaan lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang memiliki manfaat bagi Peningkatan realisasi Investasi dan peningkatan pelayanan perizinan berbasis risiko dan non perizinan serta digambarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang akan digunakan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang berfokus pada kegiatan-kegiatan rutin penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari kegiatan administrasi umum, peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur, perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dan kegiatan administrasi keuangan. Program promosi penanaman modal berfokus pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Program ini diarahkan untuk mencapai target indikator jumlah investor, nilai investasi, daya serap tenaga kerja dan kenaikan/ penurunan nilai realisasi investasi PMDN dan PMA. Program pengembangan iklim penanaman modal diarahkan pada kegiatan penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, dan

kegiatan pembuatan peta potensi investasi Kabupaten. Hasil renja 2026 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara dari kegiatan dalam program ini nantinya akan memudahkan investor dalam menentukan nilai investasi dan menjadi acuan pengukuran kenaikan/ penurunan nilai realisasi investasi. Program pelayanan penanaman modal berfokus pada kegiatan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah Kutai Kartanegara. Kegiatan ini bertujuan memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi investor dan akses pengaduan masyarakat. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal berfokus pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, bertujuan untuk Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal berfokus pada kegiatan urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 disusun dengan memperhatikan target capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030, Untuk tahun 2026 terdiri dari 6 (Enam) program, 14 (Empat belas) kegiatan dan 48 (Empat puluh delapan) sub kegiatan dengan kebutuhan dana sesuai dengan pagu indikatif yang telah diusulkan adalah sebesar Rp. **23.534.440.481,00** dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan paket-paket pekerjaan penunjang pencapaian outcome Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel TC 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan					Meningkatkan penanaman modal di Kutai Kartanegara	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	11,07 Persen	23.534.440.481,00	APBD		11,29 Persen	35.746.230.336
Sasaran					Meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah	Pertumbuhan realisasi investasi sektor non ekstraktif		39,73 persen		APBD		39,93 persen	
Sasaran					Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha	Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu		93,81 Nilai		APBD		94,75 Nilai	
2	18	1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Kutai Kartanegara	77,94 Nilai	16.934.440.481,00	APBD		77,94 Nilai	23.580.653.480
2	18	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 persen	753.671.500,00	APBD		100 Persen	1.464.935.850
2	18	1	02.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	150.000.000,00	APBD		2	292.852.000
2	18	1	02.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD		4	57.881.250

2	18	1	02.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	2 laporan	50.000.000,00	APBD		7	376.728.800
2	18	1	02.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	60.343.200,00	APBD		2	61.550.000
2	18	1	02.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	umlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD		1	53.060.400
2	18	1	02.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	umlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Data	100.000.000,00	APBD		1	265.302.000
2	18	1	02.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Berita acara	50.000.000,00	APBD		1	58.366.500
2	18	1	02.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	293.328.300,00	APBD		2	299.194.900
2	18	1	02.02		Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	84,96 persen	11.850.949.029,00	APBD		88,39 persen	11.806.871.629
2	18	1	02.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan	Kab. Kutai Kartanegara	104 orang/bulan	11.381.533.629,00	APBD		104 orang/bulan	11.381.533.629
2	18	1	02.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	43 Dokumen	33.750.000,00	APBD		43	34.728.750

2	18	1	02.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	33.750.000,00	APBD		1	34.728.750
2	18	1	02.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	50.000.000,00	APBD		1	115.762.500
2	18	1	02.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	18.703.800,00	APBD		1	57.881.250
2	18	1	02.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	299.461.600,00	APBD		2	147.508.000
2	18	1	02.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	33.750.000,00	APBD		1	34.728.750
2	18	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	164.999.000,00	APBD		100 Persen	355.000.000
2	18	1	02.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	14.999.000,00	APBD		2 Dokumen	30.000.000
2	18	1	02.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	50.000.000,00	APBD		2 Laporan	50.000.000
2	18	1	02.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	2 laporan	40.000.000,00	APBD		6 laporan	30.000.000

2	18	1	02.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 laporan	50.000.000,00	APBD		1 Laporan	225.000.000
2	18	1	02.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	10.000.000,00	APBD		2 Dokumen	20.000.000
2	18	1	02.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	20.000.000,00	APBD		100 Persen	58.940.625
2	18	1	02.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara			APBD			
2	18	1	02.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		1	30.000.000
2	18	1	02.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	20.000.000,00	APBD		12	28.940.625
2	18	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	175.000.000,00	APBD		100 Persen	2.500.000.000
2	18	1	02.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD		3 Unit	150.000.000
2	18	1	02.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD		3 Paket	900.000.000
2	18	1	02.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		2 Dokumen	150.000.000
2	18	1	02.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	25.000.000,00	APBD		4 Laporan	150.000.000

2	18	1	02.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	15 Orang	100.000.000,00	APBD		160 Orang	750.000.000
2	18	1	02.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Kutai Kartanegara	75 Orang	50.000.000,00	APBD		75 Orang	400.000.000
2	18	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	1.175.000.000,00	APBD		100 Persen	2.801.000.000,00
2	18	1	02.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		1 paket	115.000.000
2	18	1	02.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 paket	300.000.000,00	APBD		1 paket	400.000.000
2	18	1	02.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Paket	300.000.000,00	APBD		1 paket	450.000.000
2	18	1	02.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2 paket	250.000.000,00	APBD		2 Paket	350.000.000
2	18	1	02.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bagan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	25.000.000,00	APBD		12 Dokumen	25.000.000
2	18	1	02.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		12 laporan	200.000.000
2	18	1	02.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	250.000.000,00	APBD		12 laporan	961.000.000
2	18	1	02.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	500 Dokumen	50.000.000,00	APBD		8500 Dokumen	300.000.000

2	18	1	02.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah kegiatan/berita	Kab. Kutai Kartanegara			APBD			
2	18	1	02.07	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD		100 Persen	1.060.718.000
2	18	1	02.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara			APBD			
2	18	1	02.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara			APBD			
2	18	1	02.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		72	557.628.000
2	18	1	02.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD		20	503.090.000
2	18	1	02.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara			APBD			
2	18	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	1.639.110.952,00	APBD		100 Persen	2.032.087.376
2	18	1	02.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	2.550.000,00	APBD		2 Laporan	5.000.000
2	18	1	02.09	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	266.766.216,00	APBD		12 Laporan	266.766.216
2	18	1	02.09	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	24 Laporan	36.421.200,00	APBD		12 Laporan	150.000.000
2	18	1	02.09	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	1.333.373.536,00	APBD		12 Laporan	1.610.321.160

2	18	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	1.155.710.000	APBD		100 Persen	1.351.100.000
2	18	1	02.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kab. Kutai Kartanegara	23 Unit	565.710.000,00	APBD		4 Unit	201.720.000
2	18	1	02.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		20 Unit	212.520.000
2	18	1	02.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	120 Unit	90.000.000,00	APBD		189 unit	106.620.000
2	18	1	02.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		2 Unit	262.120.000
2	18	1	02.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		4 Unit	200.000.000
2	18	1	02.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Unit	500.000.000,00	APBD		1 Unit	50.000.000
2	18	1	02.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		2 Unit	318.120.000
2	18	1	02.13		Penataan Organisasi	Persentase Jumlah Laporan hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan tatalaksana	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		100 Persen	150.000.000
2	18	1	02.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		12 Laporan	150.000.000

2	18	2			<i>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</i>	<i>Realisasi total terhadap target investasi</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>17,16 Triliun Rupiah</i>	<i>2.500.000.000,00</i>	<i>APBD</i>		<i>5,50%</i>	<i>3.278.973.846</i>
2	18	2	02.01		Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Draf regulasi (Perbup/Perda) yang mendukung sektor non-ekstraktif)	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	450.000.000,00	APBD		100 Persen	1.178.973.846
2	18	2	02.02	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara			APBD			
2	18	2	02.02	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Kutai Kartanegara	70 Dokumen	450.000.000,00	APBD		133	1.178.973.846
2	18	2	02.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Peta Peluang Investasi Non ekstratif yang terukur (Dokumen IPRO)	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	2.050.000.000,00	APBD		4 Dokumen	2.100.000.000,00
2	18	2	02.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	250.000.000,00	APBD		1 dokumen	300.000.000,00
2	18	2	02.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	1.800.000.000,00	APBD		3 Dokumen	1.800.000.000,00
2	18	3			<i>Program Promosi Penanaman Modal</i>	<i>Persentase peningkatan investor yang berinvestasi</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>78 persen</i>	<i>1.050.000.000,00</i>	<i>APBD</i>		<i>83%</i>	<i>2.363.928.710,00</i>
2	18	3	02.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan promosi Investasi sektor non-ekstraktif yang diselenggarakan	Kab. Kutai Kartanegara	4 kegiatan	1.050.000.000,00	APBD		5	2.363.928.710,00

2	18	3	02.01	0003	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	750.000.000,00	APBD		5	1.403.582.672,00
2	18	3	02.01	0002	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	300.000.000,00	APBD		2	960.346.038,00
2	18	4			<i>Program Pelayanan Penanaman Modal</i>	<i>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>100 persen</i>	<i>1.300.000.000,00</i>	<i>APBD</i>		<i>95,69 Nilai</i>	<i>2.509.576.500,00</i>
2	18	4	02.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan perizinan berusaha yang diterbitkan sesuai SP dan SOP berdasarkan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	2458 izin	1.300.000.000,00	APBD		100 Persen	2.509.576.500,00
2	18	4	02.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	12 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	APBD		5 Pelaku Usaha	Rp 276.020.200
2	18	4	02.01	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	100Pelaku Usaha	300.000.000,00	APBD		1104Pelaku Usaha	Rp 636.724.800

2	18	4	02.01	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	1000 Pelaku Usaha	400.000.000,00	APBD		1082 Pelaku Usaha	550.000.000
2	18	4	02.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	1000 Pelaku Usaha	500.000.000,00	APBD		1149 Kegiatan Usaha	1.046.831.500
2	18	5			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Kab. Kutai Kartanegara	100 persen	750.000.000,00	APBD		79 Persen	1.307.017.400
2	18	5	02.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha, dilakukan Bimbingan teknis dan di lakukan Pengawasan	Kab. Kutai Kartanegara	150 pelaku usaha/kegiatan usaha	750.000.000,00	APBD		100 Persen	1.307.017.400
2	18	5	02.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD		61 Kegiatan Usaha	200.000.000

2	18	5	02.01	0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Kutai Kartanegara	400 Pelaku usaha	450.000.000,00	APBD		463 Pelaku Usaha	707.017.400
2	18	5	02.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Kutai Kartanegara	150 Kegiatan Usaha	300.000.000,00	APBD		33 Kegiatan Usaha	400.000.000
2	18	6			<i>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>	<i>Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>100 persentase</i>	<i>1.000.000.000,00</i>	<i>APBD</i>		<i>100 Persen</i>	<i>2.706.080.400,00</i>
2	18	6	02.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	10 Laporan	1.000.000.000,00	APBD		10 Dokumen	2.706.080.400,00
2	18	6	02.01	0002	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	Kab. Kutai Kartanegara	10 Dokumen	1.000.000.000,00	APBD		10 Dokumen	2.706.080.400

BAB V

PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan daya saing investasi daerah serta dengan indikator pertumbuhan investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah merancang program kerja yang lebih komprehensif dan strategis untuk tahun mendatang. Sebagai bagian dari rencana penguatan kebijakan dan optimalisasi pelayanan, terjadi peningkatan alokasi anggaran yang signifikan.

Kenaikan anggaran dari Rp. 20.433.370.644,00 menjadi Rp. 23.534.440.481,00 atau meningkat sebesar Rp.3.101.069.837,00 didasarkan pada beberapa faktor utama:

1. Peningkatan Target Capaian Investasi

Untuk memastikan realisasi pertumbuhan investasi yang lebih tinggi, diperlukan penyesuaian anggaran guna mendukung infrastruktur, promosi investasi, serta fasilitasi kemudahan berusaha di daerah.

2. Penguatan Sistem dan Digitalisasi Layanan

Investasi dalam sistem pelayanan berbasis digital menjadi salah satu prioritas utama guna mempercepat proses perizinan dan meningkatkan transparansi dalam layanan kepada investor.

3. Peningkatan Kapasitas dan SDM

Dengan adanya peningkatan target dan perubahan regulasi yang dinamis, diperlukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia agar lebih adaptif terhadap perubahan global serta meningkatkan kualitas pelayanan investasi.

4. Penyediaan Insentif Investasi

Untuk menarik investor strategis ke daerah, alokasi anggaran tambahan digunakan untuk berbagai skema insentif, baik dalam bentuk fasilitas fiskal maupun non-fiskal, guna menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.

Adapun Rencana Tindak Lanjut dari peningkatan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2026, DPMPTSP melakukan beberapa langkah strategis yang akan dilakukan meliputi:

1. Optimalisasi Penggunaan Anggaran

Memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan digunakan secara efisien dan efektif sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program-program yang diusulkan berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan investasi.

3. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Menguatkan kerja sama dengan sektor swasta, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya guna menciptakan ekosistem investasi yang lebih kondusif.

4. Peningkatan Pelayanan Terpadu

Melanjutkan inovasi dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) agar lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan investor.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah dirancang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu optimis bahwa kenaikan anggaran ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan daya saing investasi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 mendatang.

Tenggarong, 06 Agustus 2025

Kepala,

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



ALEIAN NOOR, SE., M.Ling

Pembina Utama Muda/IV c

NIP. 196901131995031005